

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN  
TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PERJANJIAN KERJA  
(STUDI KASUS PROVINSI JAWA TIMUR)**

**SKRIPSI**



OLEH :

FIRDA PRADITA OKTAVIANI

NPM: 18300127

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2022**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN  
TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PERJANJIAN KERJA  
SKRIPSI**

**SEBAGAI SALAH SATU PEMENUHAN PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

FIRDA PRADITA OKTAVIANI  
NPM: 18300127

SURABAYA, 6 JANUARI 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. ii

PEMBIMBING,

Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN  
TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19 DAN AKIBAT HUKUMNYA  
TERHADAP PERJANJIAN KERJA  
DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:**

OLEH:

FIRDA PRADITA OKTAVIANI

NPM : 18300127

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H. (KETUA)

2. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn. (ANGGOTA)

3. Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H. (ANGGOTA)

1. ....  
2. ....  
3. ....

## **MOTTO**

“Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk  
mengejarinya.”

Firda Pradita Oktaviani

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-nya, sehingga skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERJANJIAN KERJA”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjoro dr Sp THT-KI (K) FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Bapak Suprat, S.H.,M.H., Ibu Sugiarti (almh) dan kakak Hilda Pravita Aprilia beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan doa yang terbaik.
8. Teman-teman selama masa perkuliahan Amaynia Anggun Rosita, Ikhlasul Solah Wardani dan masih banyak lagi yang selalu ada untuk menemani, membantu saya selama masa perkuliahan dari semester pertama sampai sekarang.
9. Teman-teman dirumah saya Indana Nazulfa dan Arya Andre yang selalu support pengerjaan apapun asal positif dan bermanfaat.
10. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang selalu mendukung dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah S.W.T dan saya sebagai penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Hormat Saya,

Penulis

Firda Pradita Oktaviani

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firda Pradita Oktaviani  
NPM : 18300127  
Alamat : Griya Citra Asri RM 12A Nomor 24  
No. Telp (HP) : 081282407722

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERJANJIAN KERJA**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 6 Januari 2022  
Yang Menyatakan,

**FIRDA PRADITA OKTAVIANI**  
NPM: 18300127

## **ABSTRACT**

*This paper is entitled the government's policy on wages for labor-intensive industries during the covid 19 pandemic and its legal consequences on work agreements. This writing aims to identify and analyze the impact of the Covid-19 Pandemic on the employment status of workers in East Java Province, especially the City of Surabaya, as well as the efforts made by the Provincial Government, especially the City of Surabaya, to fulfill their obligations to fulfill the rights of these workers. This research is a qualitative research with a doctrinal approach, and uses secondary data obtained through literature study in the form of regulatory and policy instruments as well as relevant scientific concepts.*

*The problems studied in this study are regarding legal protection for workers and employers related to the Determination of the Provincial Minimum Wage, especially the city of Surabaya during the covid 19 pandemic which is analyzed through legal certainty regarding the existence of Law 13 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages , as well as the Decree of the Governor of East Java No.188/538/KPTS/013/2021 concerning UMSK in East Java 2021. The research method is normative juridical, with the results of the study being that the stages of legal procedures for determining UMSK have been clearly accommodated in the regulations above to technical regulations and implementing regulations.*

*This study concluded that the Covid-19 pandemic had an impact on the employment status of some workers in the city of Surabaya, namely experiencing layoffs (PHK) or being 'at home'. Regarding this situation, the Provincial Government, especially the City of Surabaya, is trying its best so that the rights of workers affected by the Covid-19 handling policy can be fulfilled by the company by encouraging an agreement to be reached between the parties. For workers who are affected, the Provincial Government, especially the City of Surabaya, also provides various stimuli and social assistance.*

***Keywords: Protection of Workers' Rights: the impact of the Covid 19 pandemic, East Java Province***



## ABSTRAK

Penulisan ini berjudul kebijakan pemerintah dalam pengupahan terhadap industri padat karya pada masa pandemi covid 19 dan akibat hukumnya terhadap perjanjian kerja. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Pandemi Covid-19 terhadap status ketenagakerjaan para pekerja di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi khususnya Kota Surabaya melaksanakan kewajibannya memenuhi hak para pekerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa perangkat regulasi dan kebijakan serta konsep-konsep keilmuan yang relevan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja maupun pengusaha terkait Penetapan Upah Minimum Provinsi khususnya kota Surabaya di masa pandemic covid 19 yang dianalisis melalui kepastian hukum tentang adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, serta Keputusan Gubernur Jatim No.188/538/KPTS/013/2021 Tentang UMSK di Jawa Timur 2021. Metode penelitian adalah yuridis normatif, dengan hasil kajian adalah Tahapan prosedur hukum atas penetapan UMSK telah jelas terakomodir dalam peraturan-peraturan diatas hingga peraturan teknis dan peraturan pelaksanaannya.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada status ketenagakerjaan sebagian pekerja di Kota Surabaya, yaitu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau 'di rumahkan'. Terhadap situasi tersebut, Pemerintah Provinsi khususnya Kota Surabaya berusaha maksimal agar hak-hak pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan mendorong agar dicapai kesepakatan diantara para pihak. Bagi pekerja yang terdampak, Pemerintah Provinsi khususnya Kota Surabaya juga memberikan berbagai stimulus dan bantuan sosial.

**Kata Kunci: Perlindungan Hak Pekerja: dampak pandemic Covid 19, Provinsi Jawa Timur**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.....	
	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kerangka Konseptual.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Sistematika Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGUPAHAN TERHADAP INDUSTRI PADAT KARYA PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Pengupahan Di Masa Pandemi Covid 19.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Hak Upah Minimum Yang Diberikan Oleh Pemerintah Provinsi  
Jawa Timur Kepada Industri Padat Karya .**Error! Bookmark not defined.**

C. Temuan Peneliti.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III AKIBAT HUKUM ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENGUPAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PERJANJIAN KERJA .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Belum Memenuhi Hak Pekerja**Error! Bookmark not defined.**

B. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemenuhan Hak  
Pekerja .....**Error! Bookmark not defined.**

C. Temuan Peneliti.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BACAAN.....**Error! Bookmark not defined.**

